Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah
Volume 4 Nomor 2 Halaman 431-436 April 2019

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN DI KALIMANTAN SELATAN (ANALISIS DATA SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012)

Area of Residence and Women First Age Marriage in South Kalimantan (The Analysis of Indonesian Demographic and Health Survey 2012)

Norma Yuni Kartika[1]*, Sopyan[2], Nur Kholipah[1], Bahriannor[1]
[1] Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
[2] BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
*Penulis koresponden: noerma.unlam@yahoo.com, norma.kartika@ulm.co.id

Abstract

This paper is analyze the area of residence and first age marriage in South Kalimantan. The researcher is using analysis and secondary methods, from the data of Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI in Indonesia) in 2012. The population in this research is 1.015 women in average 15-49 years old which has been married, and then in statistical test of Chi Square with SPSS program. The finding of this research that in rural area the minimum first age marriage is 9 years old and the maximum is 35 years old, order of the top three top percentages of first age marriage is 17 years old, 19 years old and 16 years old. In urban area the minimum and maximum of first age marriage is 10 and 43 years old, with the top of three top percentage of first age marriage is 18, 17 and 19 years old. From the result of Chi Square found that first age marriage, education, and main job have meaningful differences with the area of residence. Woman in rural area of South Kalimantan, the majority of their first age marriage is under 18 years old, they were graduated from elementery school and work in agriculture. Women in urban area of South Kalimantan, the majority of their first age marriage is 21 years old and above, they were graduated from junior high school and work in non agriculture

Key word: area, residence, first age marriage, women

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan daerah tempat tinggal hubungannya dengan usia kawin pertama merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia, ketimpangan itu juga terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan karakteristik geografis yang berbeda-beda membuat Indonesia memiliki keragaman budaya, variasi kondisi sosial ekonomi, dan politik yang beragam. Keragaman budaya di Indonesia, salah satunya tentang keragaman budaya perkawinan yang berbeda antarwilayah. Dalam tulisannya Manda dan Meyer (2005) menjelaskan bahwa usia kawin pertama perempuan yang semakin muda berhubungan dengan semakin mudanya umur saat pertama kali melahirkan. Dengan demikian, semakin muda umur kawin pertama akan membuka peluang untuk menghadapi jumlah kelahiran yang lebih banyak, sebagai akibat semakin panjangnya rentang usia reproduktif perempuan.

Dalam teori modernisasi Goode (Vu, 2005) menyebutkan bahwa industriaslisasi telah merubah sistem keluarga di negara berkembang berubah ke arah negara-negara Eropa (*westernisasi*). Proses modernisasi tersebut membuat masyarakat dengan status sosial yang tinggi memilih untuk menikah di usia matang karena keinginan mereka untuk mendapatkan kebebasan. Masyarakat yang lahir dan besar di kota besar lebih memilih untuk menikah di usia tua dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan atau kota kecil. Choe, Thapa dan Achmad dalam penelitiannya di Indonesia dan Nepal (2001) ditinjau dari segi demografis menunjukkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada perempuan di Indonesia terutama di pedesaan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah serta faktor akses informasi yang tidak memadai.

Pada tahun 2015 Kalimantan Selatan menjadi *trending topic* terkait usia kawin pertama yang rendah, angka pernikahan dini di provinsi tersebut mencapai 51 kasus per 1.000 penduduk, angka yang menjadi Kalimantan Selatan peringkat pertama nasional dalam kasus pernikahan dini. Ini jelas bukan hal yang membanggakan, mengingat dampak dari usia kawin pertama yang rendah

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

membayangi baik untuk perempuan, pasangannya maupun anak yang dilahirkan. Hasil penelitian sebelumnya dan fakta yang berhubungan dengan usia kawin pertama di Kalimantan Selatan, membuat peneliti tertarik untuk menganalisis daerah tempat tinggal dihubungkan dengan usia kawin pertama.

Wilayah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kondisi geografi yang beragam, terdapat wilayah rawa, wilayah pantai, dan wilayah pegunungan dengan julukan seribu sungai yang membuat masyarakat memiliki kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda di setiap wilayahnya. Tulisan ini menganalisis daerah tempat tinggal dan usia kawin pertama di Kalimantan Selatan. Sejauh ini kajian tentang daerah tempat tinggal dan usia kawin pertama di Kalimantan Selatan relatif masih terbatas.

2. METODE

Analisis data sekunder menjadi metode yang digunakan dalam analisis daerah tempat tinggal kaitanya dengan usia perkawinan pertama di Kalimantan Selatan. Yang dimaksud dengan analisis data sekunder adalah rangkaian kerja analisis yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan atau untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya (*original presented*). Data yang dimaksud dapat berasal dari berbagai metode pengumpulan data (sensus, survei maupun dokumen) yang belum semuanya digunakan dalam analisis sebelumnya (Effendi dan Tukiran 2012).

Data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Data yang digunakan hanya untuk provinsi Kalimantan Selatan. Penggunaan data SDKI 2012 dengan alasan data yang ada sesuai untuk menjawab tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan usia 15-49 tahun yang telah menikah berjumlah 1.015 responden. Perbedaan SDKI sebelumnya dengan SDKI 2012 yaitu perempuan yang jadi responden tidak hanya yang berada dalam ikatan perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan, SDKI 2012 mencakup juga perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersaji pada Tabel 1.

Usia perkawinan pertama dibagi dalam tiga kategori, alasan menggunakan usia di bawah 18 tahun mengacu pada undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan usia 21 tahun keatas mengacu pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) jika menikah usia 21 tahun keatas sudah dinyatakan dewasa sehingga tidak perlu disertai ijin kedua atau salah satu orang tua atau yang ditunjuk sebagai wali. Analisis data sekunder yang digunakan untuk menjawab tujuan tulisan ini menggunakan tabel silang dan uji *Chi Square* dengan memanfaatkan *Software Statistical Package Social Science* (SPSS).

Tabel 1. Variabel, kode pertanyaan dan indikator yang di gunakan dalam penelitian ini

Variabel	Kode Pertanyaan	Indikator
Daerah tempat tinggal	V102	Perdesaan Perkotaan
Usia kawin pertama	V511	< 18 tahun 18 – 20 tahun >21 tahun
Tingkat pendidikan	V106	Tidak Sekolah Tamat SD/sederajat Tamat SMP/sederajat Tamat SMA/PT
Kegiatan utama	V714	Tidak bekerja Bekerja di bidang agraris Bekerja di bidang non agraris

Sumber: Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Usia Kawin Pertama

Dalam kajian ini daerah tempat tinggal terbagi menjadi dua yaitu perdesaan dan perkotaan. Definisi usia kawin pertama menurut BPS adalah usia pada saat seseorang melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali (BPS 2012).

Di perdesaan usia kawin pertama minimal 9 tahun dan maksimal 35 tahun (Tabel 1). Urutan tiga besar persentase terbanyak usia kawin pertamanya yaitu 17 tahun (12,15%), 19 tahun (11,97%) dan 16 tahun (10,74%). Di perkotaan usia minimal dan maksimal perkawinan pertama perempuan adalah 10 dan 43 tahun, dengan tiga peringkat tertinggi persentase usia kawin pertama antara lain 18 tahun (10,96%), 17 tahun (10,51%) dan 19 tahun (8,72%). Hasil SDKI 2012 di Kalimantan Selatan tidak jauh beda dengan hasil penelitian BPS dan UNICEF (2016) bahwa risiko perkawinan usia anak berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, dengan anak perempuan perdesaan dan miskin sebagai kelompok paling rentan terhadap praktik ini.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

Jain dan Kurz (2007) dibeberapa daerah di suatu negara terutama di daerah perdesaan, masyarakatnya lebih menerima praktik maupun usia perkawinan yang lebih muda untuk anak perempuan dibandingkan masyarakat di deerah-daerah lainnya.

Tabel 2. Tabulasi silang daerah tempat tinggal dengan usia tunggal kawin pertama perempuan di Kalimantan Selatan

Usia kawin pertama (tahun)	Tempat tinggal			
	Perdesaan		Perkotaan	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
9	3	0,53	0	0
10	7	1,23	2	0,45
11	10	1,76	4	0,89
12	19	3,35	9	2,01
13	23	4,05	10	2,24
14	39	6,87	19	4,25
15	56	9,86	19	4,25
16	61	10,74	25	5,59
17	69	12,15	47	10,51
18	55	9,68	49	10,96
19	68	11,97	39	8,72
20	28	4,93	38	8,50
21	38	6,69	30	6,71
22	27	4,75	35	7,83
23	8	1,41	33	7,38
24	17	2,99	23	5,15
25	8	1,41	22	4,92
26	6	1,06	6	1,34
27	5	0,88	11	2,46
28	3	0,53	4	0,89
29	4	0,70	2	0,45
30	2	0,35	4	0,89
31	4	0,70	4	0,89
32	4	0,70	3	0,67
33	3	0,53	1	0,22
34	0	0	2	0,45
35	1	0,18	1	0,22
36	0	0	1	0,22
38	0	0	1	0,22
39	0	0	1	0,22
40	0	0	1	0,22
43	0	0	1	0,22
Jumlah	568	100	447	100

Sumber: Diolah dari Data SDKI Tahun 2010 Kalimantan Selatan

Agar pembahasan dapat lebih komprehensif, analisis daerah tempat tinggal juga dikaitkan dengan usia kawin pertama berdasarkan kelompok usia kawin pertama. Usia kawin pertama dalam tulisan ini dibagi menjadi 3, yaitu di bawah 18, 18-20 dan 21 tahun ke atas. Klasifikasi di bawah 18 tahun berpedoman pada pengelompokan usia kawin pertama menurut Bogue (1969), bahwa usia kawin pertama kurang dari 18 tahun disebut *child marriage* (perkawinan anak). Klasifikasi usia 21 tahun keatas berpedoman dari undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Tabel 3. Tabulasi silang dan hasil *chi square* daerah tempat tinggal berdasarkan usia kawin pertama di Kalimantan Selatan

Usia kawin pertama	Tempat tinggal		Nilai X^2_{Hitung}	Df	Nilai X^2_{Tabel}	Nilai Sig.
	Desa	Kota				
< 18 tahun	50,53	30,20				
18-20 tahun	26,58	28,19	53,26*	2	5,99	0,000
> 21 tahun	22,89	41,61				*

Sumber: Diolah dari Data SDKI Tahun 2010 Kalimantan Selatan

Terdapat beberapa temuan pada penelitian ini yaitu temuan terkait daerah tempat tinggal dengan usia perkawinan pertama. Pertama, di perdesaan provinsi Kalimantan Selatan separuh lebih dari 1.015 perempun usia 15-49 tahun melakukan perkawinan anak, temuan ini dua kali lipatnya temuan Susenas (2012) pada perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin dan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi tertinggi di daerah perdesaan. Ini menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan Darurat perkawinan anak. Maryati dan Septikasari (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa 21,75% anak perempuan di perkotaan dan 47,79% anak perempuan di pedesaan menikah pada usia di bawah 16 tahun.

Kedua, usia kawin pertama perempuan di bawah 18 tahun lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan, sedangkan usia kawin pertama perempuan 18-20 tahun dan 21 tahun keatas persentasenya lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan Kalimantan Selatan. Sejalan dengan hasil survey Pathfinder International (WHO 2006) bahwa persentase wanita perdesaan lebih kecil dibandingkan wanita perkotaan yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih tua.

Ketiga, di perdesaan makin dewasa usia kawin pertama perempuan persentasenya semakin menurun. Usia kawin pertama perempuan diatas 21 tahun di perkotaan persentasenya tertinggi yaitu 41,61% sedangkan di perdesaan hanya 22,89%. Temuan tersebut diperkuat dengan temuan East-West Center (Choe, Thapa & Achmad 2001) yang fokus penelitiannya pada pernikahan dini di Indonesia dan Nepal, di Indonesia pernikahan dini umum dijumpai di daerah perdesaan dan di Nepal

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

umum terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Keempat, usia kawin pertama yang rendah termasuk kategori perkawinan anak karena menikah dibawah 18 tahun, 50,53% di perdesaan dan 30,20% di perkotaan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan darurat perkawinan anak. Fenomena ini menjadi masalah tersendiri di bidang kependudukan yang perlu penanganan serius, karena tingginya kasus perkawinan anak di Kalimantan Selatan baik di perdesaan maupun di perkotaan akan menimbulkan banyak masalah diberbagai bidang yang akan menghambat pembangunan seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan, resiko kehamilan usia dini, kesehatan bayi yang dilahirkan, gizi anak, keberlanjutan kemiskinan, pendidikan, ekonomi, jumlah anak, beban ketergantungan.

Kelima, program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang berupaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di perkotaan perempuan yang menikah sesuai program PUP jumlahnya 2 kali perempuan yang menikah di atas 21 tahun perdesaan. PUP di perdesaan perlu lebih digalakkan lagi, agar usia perkawinan pertamanya lebih dewasa sehingga bisa terhindar dari dampak negatif perkawinan anak.

3.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan penting bagi laki-laki maupun perempuan. Pendidikan merupakan salah satu indikator dari aspek sosial dan ekonomi yang berpengaruh dalam masyakarat. Tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada peluang memperoleh kesempatan bekerja dan meraih penghidupan yang lebih baik. Penduduk di perkotaan menganggap bahwa tingkat pendidikan berkorelasi dengan biaya sosial ekonomi yang tinggi, sehingga pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi.

Berdasarkan Tabel 4, diketahui perbedaan daerah tempat tinggal berdasarkan tingkat pendidikan di Kalimantan Selatan. Pertama, jika dibandingkan perempuan di perdesaan mayoritas tamatan SD/sederajat dan di perkotaan mayoritas tamatan SMP/sederajat. Sejak tahun 1994 oleh Presiden Indonesia telah dicanangkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagai upaya pemerataan pendidikan dasar baik untuk laki-laki maupun perempuan, di perdesaan maupun perkotaan. Dalam penelitian ini artinya bahwa perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kalimantan Selatan capaian pendidikan dasar sembilan tahun di perkotaan 75,62% dan di perdesaan 38,2%.

Tabel 4. Tabulasi silang dan hasil *chi square* daerah tempat tinggal berdasarkan pendidikan di Kalimantan Selatan

Tingkat Pendidikan	Tempat tinggal		Nilai X^2_{Hitung}	Df	Nilai X^2_{Tabel}	Nilai Sig.
	Desa	Kota				
Tidak Sekolah	5,28	1,34				
Tamat SD/sederajat	56,51	23,04	155,5*	3	7,82	0,00*
Tamat SMP/sederajat	34,68	59,51				
Tamat SMA/PT	3.52	16,11				

Sumber: Diolah dari Data SDKI Tahun 2010 Kalimantan Selatan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik ditunjukkan melalui keberhasilan pada pencapaian tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini kondisi sosial ekonomi perempuan perdesaan bisa dikatakan tidak baik dilihat dari pencapaian tingkat pendidikan yang didominasi tamat SD/sederajat. Capaian ini jauh dari program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hanya sepertiga perempuan perdesaan yang mampu mencapai program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kondisi sosial ekonomi perempuan perkotaan lebih baik dibanding perdesaan dilihat dari pencapaian tingkat pendidikannya yaitu sebanyak tiga perempat mencapai wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan berdasarkan kebutuhan pendidikan mendasar di sektor pasar kerja saat ini yaitu pendidikan 12 tahun masih jauh dari harapan.

Menurut Coombs dan Ahmed (dalam Danim 2008) kesenjangan kuantitatif dan ketimpangan kualitatif antara pendidikan di desa dan kota sejak dahulu sangat menonjol, lebih-lebih untuk saat ini. Dampak langsung dari gejala ini adalah mobilitas pendidikan yang timpang. Dari sudut pemerataaan, pendidikan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu kualitas dan kuantitas. Pemerataaan kualitas dan kuantitas pendidikan dibahas terkait dengan upaya mengurangi urbanisasi anak usia sekolah. Urbanisasi (berangkatnya anak usia sekolah dari desa ke kota) disebabkan pendidikan yang belum merata di pedesaan, baik kuantitas maupun kualitas. Rendahnya kapabilitas pendidikan dalam jumlah dan mutu di pedesaan menyebabkan anak usia sekolah cenderung memilih pendidikan tingkat tertentu di kota dengan berbagai alasan.

Kedua, temuan lain adalah perempuan yang tidak berpendidikan di perdesaan persentasenya 4

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

kali lipat dibandingkan perkotaan. Seharusnya penduduk di perdesan memiliki peluang yang sama dengan masyarakat perkotaan untuk memperoleh pendidikan. Peluang pendidikan dibuka sama lebarnya untuk penduduk di perkotaan maupun perdesaan pada semua jenjang pendidikan. Meski terdapat beberapa perbedaan, seperti untuk SD/sederajat mungkin tidak terlalu sulit untuk menjangkau sekolah, tetapi begitu SMP/sederajat sudah mulai agak jauh dan SMA/PT makin jauh.

Ketiga, persentase perempuan berpendidikan tamatan SMA/PT di perkotaan jumlahnya 5 kali lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan gedung SMP/sederajat dan SMA/sederajat di daerah perdesaan, ditambah kurangnya tenaga pendidik di daerah perdesaan menjadi penyebab sedikitnya perempuan yang mampu menamatkan jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/PT. Bias gender yang diterima perempuan menjadikan perempuan terhambat dalam memenuhi hak pendidikannya. Pendidikan sebagai alat pengubah perilaku manusia menempati posisi tersendiri dalam kancah kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan dianggap sebagai alat (*tool*) untuk mengubah taraf hidup manusia dari kondisi buruk ke kondisi yang lebih bermutu di masa mendatang (Danim,2008).

3.3 Kegiatan Utama

Kegiatan utama dapat diasumsikan sebagai indikator bagi keadaan dan struktur ekonomi dalam suatu masyarakat. Dari Tabel 5 ditemukan hal menarik dari perbandingan daerah perdesaan dan perkotaan. Pertama, urutan persentase status bekerja perempuan dari terendah baik di perdesaan maupun perkotaan sama yaitu bekerja di bidang non agraris, tidak bekerja, dan bekerja di bidang agraris.

Tabel 5. Tabulasi silang dan hasil *chi square* daerah tempat tinggal berdasarkan kegiatan utama di Kalimantan Selatan

Kegiatan utama	Tempat tinggal		Nilai X^2_{Hitung}	Df	Nilai X^2_{Tabel}	Nilai Sig.
	Desa	Kota				
Tidak bekerja	30,46	42,73				
Bekerja di bidang pertanian	29,58	1,57	137,6*	2	5,99	0,000*
Bekerja di bidang non-pertanian	39,96	55,70				

Sumber: Diolah dari Data SDKI Tahun 2010 Kalimantan Selatan

Kedua, perempuan usia 15-49 tahun yang telah menikah berstatus tidak bekerja 30,46% di perdesaan dan 42,73% di perkotaan. Jika dibandingkan, perempuan yang tidak bekerja di perkotaan lebih banyak daripada di perdesaan. Hal ini berhubungan dengan status sosial ekonomi rumah tangga perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kalimantan Selatan. Perempuan dengan status sosial ekonomi rumah tangga yang lebih baik tidak akan bekerja untuk ikut menambah penghasilan keluarga. Berbeda dengan perempuan di perdesaan yang notabene merupakan daerah pertanian dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya perempuan ikut berpartisipasi dalam dunia kerja meski sepertiga dari 1.015 responden bekerja di bidang pertanian.

Ketiga, perempuan di perdesaan maupun perkotaan mayoritas bekerja di bidang non agraris. Perbandingan perempuan di perkotaan dan perdesaan yang bekerja di bidang agraris adalah 1: 19. Artinya 1 perempuan perkotaan yang bekerja di bidang agraris, 19 perempuan perdesaan yang bekerja di bidang agraris. Temuan ini berhubungan dengan pencapaian tingkat pendidikan di perdesaan yang sebagian besar tamatan SD/sederajat dan di perkotaan mayoritas tamatan SMP/sederajat.

3.4 Hasil Uji *Chi Square* Daerah Tempat Tinggal dengan Usia Kawin Pertama, Tingkat Pendidikan, dan Kegiatan Utama

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan variabel bebas dengan variabel terikat pada uji *Chi Square* (X^2) dengan tingkat kemaknaan X^2_{tabel} <0,05, dasar pengambilan putusan menggunakan perbandingan. Jika $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, Ho diterima atau jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$, Ho ditolak. Hipotesis uji *Chi Square* (X^2): jika Ho diterima, tidak ada perbedaan antara 2 variabel. Jika Ho ditolak, ada perbedaan antara 2 variabel.

Berdasarkan tabel 2, 3 dan 4 diketahui hasil uji *Chi Square* variabel usia kawin pertama, pendidikan dan kegiatan utama perempuan lebih besar dari *Chi Square* tabel pada tingkat signifikansi 0,05 ($X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$) maka Ho ketiga variabel bebas ditolak, yang berarti usia kawin pertama, pendidikan dan kegiatan utama mempunyai perbedaan yang bermakna dengan daerah tempat tinggal. Hasil penelitian ini sama dengan temuan Singarimbun dan Palmore (1991) dalam penelitiannya bahwa usia kawin pertama berkorelasi kuat dengan tempat tinggal sekarang, dan tempat tinggal sekarang merupakan variabel pengaruh yang penting.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

Tingkat pendidikan seseorang di perkotaan yang semakin tinggi memberikan wawasan dan pengetahuan untuk memilih melanjutkan pendidikan dan memperoleh kesempatan bekerja yang lebih baik terutama di bidang non pertanian, sehingga usia kawin pertamanya akan lebih dewasa dengan kondisi psikologis, fisik, finansial, pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan di perdesaan. Analisis status pendidikan dan status perkawinan oleh BPS dan UNICEF (2016) menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan perkawinan usia anak, sebaliknya tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong penundaan perkawinan sampai dewasa.

4. SIMPULAN

Daerah tempat tinggal mempengaruhi usia kawin pertama, pendidikan, dan kegiatan utama perempuan. Di perdesaan perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun mayoritas usia kawin pertamanya di bawah 18 tahun, tamat SD/sederajat, dan bekerja di bidang pertanian. Di perkotaan perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun mayoritas usia kawin pertamanya 21 tahun ke atas, tamat SMP/sederajat, dan bekerja di bidang non-pertanian. Jika perempuan di perdesaan capaian pendidikan wajib belajar sembilan tahun bisa mengejar ketertinggalan seperti di perkotaan dan capaian jenjang pendidikan perempuan di perkotaan lebih ditingkatkan lagi, banyak manfaat yang diperoleh perempuan. Tidak ada kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan di bidang pendidikan. Dengan sendirinya usia kawin pertama akan meningkat di kedua daerah. Perempuan lebih berpeluang berkompetisi di dunia kerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

BPS [Badan Pusat Statistik]. 2012. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan tahun 2012.* Badan Pusat Statistik, Banjarmasin.

BPS [Badan Pusat Statistik]. 2016. *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan (2015)*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Kesehatan. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

BPS [Badan Pusat Statistik] dan UNICEF. 2016. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Bogue DJ. 1969. *Principles of Demography.* John Wiley and Sons, New York.

Choe MK, Thapa S, Achmad SI. 2001. Early marriage and chidbearing in Indonesia and Nepal. East-West Center Working Papers. *Population Series* No.108-15.

Danim S. 2008. *Media Komunikasi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Effendi S, Tukiran. (Eds). 2012. *Metode Penelitian Survei.* LP3ES, Jakarta.

Jain S, Kurz K. 2007. *New Insights on Preventing Child Marriage*. International Center For Research on Women (ICRW), Washington DC. p. 24.

Manda S, Mayer R. 2005. Age of first married in Malawi: A Bayesian multilevel analysis using a discrete time-to-even model. *J.R. Statist. Soc. A.* 168(2): 439-455.

Maryanti D, Septikasari M. 2009. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Nuha Medika, Yogyakarta.

Singarimbun M, Palmore JA. 1991. *Pola Perkawinan, Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Fertilitas.* BKKBN dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Vu L. 2005. *Age at First Marriage in Vietnam: Trends and Determinants*. Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine. p. 1.

WHO. 2012. *Policy Brief: Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among Adolescents in Developing Countries: What The Evidence Says.*

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat